



Rencana Kerja Tahunan TA. 2024



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

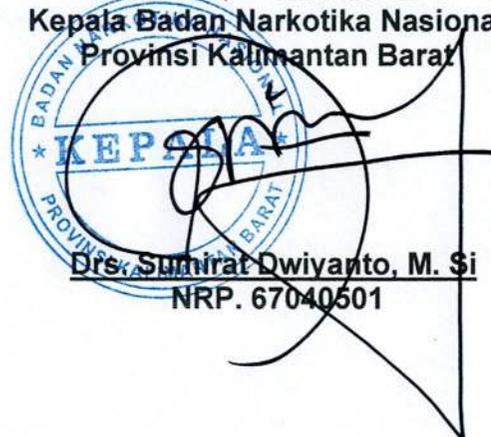
Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan disusun berdasarkan RPJMN, Renstra BNN, Renproja BNN Provinsi Kalimantan Barat, RKP serta Renja BNN RI. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman karena seyogyanya dokumen perencanaan harus sinkron dan berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan nasional yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Barat ini.

Demikian Rencana Kerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2024 ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pontianak, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat**



Drs. Sunirat Dwiyanto, M. Si
NRP. 67040501

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. LANDASAN HUKUM	6
BAB II RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	7
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024	
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TEKNIS	7
B. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN	7
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	
BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bagaikan fenomena jamur di musim penghujan. Banyaknya pengungkapan kasus baik penyelundupan, peredaran gelap maupun penyalahgunaan mencerminkan problematika yang menjadi kekhawatiran bersama. Dalam kurun waktu tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat berhasil mengungkap 14 kasus (LKN) tindak pidana narkotika dengan jumlah berkas tersangka sebanyak 19 berkas perkara TPN (19 orang tersangka: 1 orang oknum narapidana di LP Kelas IIA Pontianak, dan 1 orang warga negara Malaysia). Dari berkas perkara tersebut 18 berkas perkara yang seluruhnya telah dinyatakan lengkap dan dinaikkan ke tahap penuntut, sedangkan 1 berkas perkara masih dalam tahap penyidikan. BNNP Kalbar juga melaksanakan operasi gabungan bersama Kodam XII/Tanjungpura dan Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI sehingga berhasil mengungkap 6 kasus (LKN) tindak pidana narkotika dengan jumlah berkas perkara sebanyak 8 berkas perkara TPN (8 orang tersangka). Berdasarkan pengungkapan kasus tersebut BNNP beserta jajaran telah berhasil menyita barang bukti narkotika sebanyak 93.636,3 gram sabu, 70 butir ekstasi (23,9 gram) dan 9.856,8 gram ganja. Barang bukti lainnya adalah uang tunai sebesar Rp.2.676.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah handphone, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Total barang bukti narkotika yang diamankan tersebut, maka terselamatkan Masyarakat Kalimantan Barat sebanyak \pm 423.899 orang dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Pengungkapan tersebut didasarkan pada penyidikan dengan pengumpulan data lapangan dan data intelijen berbasis teknologi. Dari data intelijen didapatkan 3 laporan intelijen dan setelah diolah menjadi 1 peta jaringan. Peta jaringan yang telah terungkap merupakan jaringan yang telah lama memainkan bisnis narkotika. Gambaran ini tidak dapat disepelekan dan

seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kerawanan terhadap permasalahan narkoba di Kalimantan Barat juga dipengaruhi dengan kondisi geografis. Kalimantan Barat memiliki jalur perbatasan sepanjang ± 966 kilometer membentang dari Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu dengan melintasi 96 Desa dan 14 Kecamatan. Kondisi ini menjadi titik yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional ini. Salah satu tantangan pengelolaan kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat – Serawak adalah lemahnya penegakan hukum (Sarosa, 2011 : 9).

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Semester II 2022) berjumlah sekitar 5,49 juta jiwa, di mana 2,82 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,67 juta jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 37 Jiwa per Km². Sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kalimantan Barat sebesar 106. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki (Sumber: Dukcapil Prov. Kalbar). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, potensi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi.

Dari sisi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tak henti-hentinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat bersama-sama menangani permasalahan ini. Dimulai dari pembentukan Tim Terpadu, Pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, hingga pembentukan Desa Bersinar.

Sedangkan dari sisi penanganan korban penyalahgunaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program Rehabilitasi Narkoba. Tahun 2023 sebanyak 8 Klinik Pratama disediakan di 7 Kabupaten/Kota untuk melayani klien rehabilitasi. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat juga telah membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat. Tahun 2023 sebanyak 18 unit IBM telah dibentuk di Kabupaten/Kota. Tujuan dibentuknya unit ini antara lain untuk mendekatkan layanan rehabilitasi pada penerima layanan dan mengantisipasi stigma buruk masyarakat, bahwa pecandu akan dipenjara.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengemban tanggung jawab program P4GN di wilayah Kalimantan Barat telah merencanakan dan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengatasi permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat merencanakan kegiatan untuk menangani permasalahan narkotika dan bagaimana hasil kinerja dari perencanaan dan pelaksanaan tersebut.

2. Hasil Evaluasi

Penetapan Kinerja BNNP Kalimantan Barat tahun 2023 menetapkan 14 (empat belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 20 (dua puluh). Dari 20 (dua puluh) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan seluruhnya tercapai dan berada pada kategori **sangat baik**.

Berikut evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2023. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :

- a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten/Kota dari target 5 Kabupaten/Kota, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 140%.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten/Kota dari target 5 Kabupaten/Kota, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 140%.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten/Kota dari target 7 Kabupaten/Kota, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi

Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" mencapai nilai 1 Kawasan dari target 1 Kawasan, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.

- e. Indikator Kinerja Kegiatan "Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi" mencapai nilai 2,64 dari target 2,51, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 105,1%.
- f. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih" mencapai nilai 80 petugas IBM dari target 80 petugas IBM, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- g. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis" mencapai nilai 7 petugas rehabilitasi dari target 10 petugas rehabilitasi, sehingga masuk dalam kategori **Baik** dengan pencapaian sebesar 70%.
- h. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat" mencapai 2 lembaga rehabilitasi dari target 2 lembaga rehabilitasi, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- i. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat" mencapai 18 unit IBM dari target 16 unit IBM, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 112,5%.
- j. Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat" mencapai nilai 3,57 dari target 3,2, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 111,5%.
- k. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan" mencapai 1 peta jaringan dari target 1 peta jaringan, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- l. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21" mencapai 18 Berkas dari target 16 Berkas, sehingga masuk

- dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 112,5%.
- m. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - n. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - o. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)” mencapai 0 Berkas dari target 1 Berkas, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Kurang** dengan pencapaian sebesar 0%.
 - p. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 75,62 dari target sebesar 89, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 84,97 %.
 - q. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target” mencapai nilai 7 BNNK dari target sebesar 0 BNNK, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Buruk** dengan pencapaian sebesar 0%.
 - r. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 97,69 dari target sebesar 92, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 106,18%.
 - s. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target” mencapai nilai 7 BNNK dari target sebesar 7 BNNK, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - t. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal mencapai target” mencapai nilai 71,42 dari target sebesar 75, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 95,22%.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota; dan
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen Teknis

Target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik” (NKA sebesar 80 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “Sangat baik” (IKPA sebesar 97,79 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)

B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- c. Indeks kota tanggap
- d. Indeks kemandirian masyarakat
- e. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

1) Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap, berkas perkara tindak pidana narkoba yang terselesaikan, dan penyelesaian perkara TPPU tersangka narkoba. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target 1 peta jaringan.
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan besar target 8 Berkas Perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba & non narkoba dengan besar target 100%.

2) Pencegahan

Indikator program pencegahan adalah indeks ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan diri remaja kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten / Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Ketahanan diri remaja diatas 78,70.
- Kegiatan Advokasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan keluarga kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten / Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Ketahanan Keluarga diatas 52,5.

3) Dayamas

Indikator program pemberdayaan masyarakat adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 7 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah Kabupaten/Kota dengan nilai indeks kemandirian masyarakat kategori tinggi, dengan besar target 7 Kabupaten / Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Kemandirian Partisipatif diatas 3,5.
- Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan kawasan rawan dari “bahaya” menjadi “waspada”, dengan besar target 1 kawasan bahaya dan indikator kegiatan Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan, dengan besar target 2,9 (BNNP Kalimantan Barat).

4) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target 2 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target 16 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target 10 orang dan jumlah petugas unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan besar target 80 orang,
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target 3,3.

Adapun penjabaran target kinerja dan pendanaan dijabarkan sebagaimana table berikut ini :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten / Kota	183.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh Buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten / Kota	116.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	7 Kabupaten / Kota	244.002.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	66.000.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,9	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80 Orang	28.460.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar	2 lembaga	253.231.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		Rehabilitasi Narkotika	Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi		
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	16 Unit	
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,25	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang Berhasil dipetakan	1 Jaringan	150.000.000
8.	Penyidikan jaringan gelap Peredaran gelap narkotika	Meningkatnya Pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang Lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	8 Berkas	500.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	
9.	Pengawasan tahanan dan Barang bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	148.050.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
10.	Penyusunan dan	Meningkatnya proses manajemen	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	80	15.458.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 BNNK	93,278,000
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,79	5.516.232.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	7 BNNK	
12.	Pembinaan pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertical	Meningkatnya tata kelola reformasi unit kerja vertical	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75	-

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kawasan
5.		Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	10 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	2 Unit
7.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba		Kajian kepuasan penerima layanan rehabilitasi	1 Kebijakan
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	3 Laporan
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	8 Berkas
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	4 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	12 Bulan
13.	Layanan Manajemen SDM Internal	-	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan
14.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	-	Layanan BMN	1 Layanan
			Layanan Umum	1 Layanan
			Layanan Perkantoran	12 Bulan
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan
15.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	-	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan